BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Paparan Data

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan pembangunan baru, yang mendorong perubahan-perubahan agar bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.¹⁵¹ Menurut Iskandar, konsep pengembangan SDGs berpijak pada tiga pilar utama, yaitu:

1. Pertama, pilar sosial. Berorientasi pada pembangunan manusia (*human development*) secara berkualitas, adil, setara, peningkatan kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan;
2. Kedua, pilar ekonomi. Berorientasi untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan kemitraan lingkungan sosial ekonomi (*social economic development*) seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan;
3. Ketiga, pilar lingkungan (*environmental development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Artinya, SDGs merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan.¹⁵² Pernyataan pengertian dari *Sustainable*

¹⁵¹ Halim Iskandar, *SDGs Desa...*, hal. 100

¹⁵² *Ibid.*, hal. 101

Development Goals (SDGs) juga diperkuat oleh penjelasan dari Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Ahmad Muhaimin, S.sos., Beliau menjelaskan tentang pengertian *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah sebagai berikut:

SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi.¹⁵³

Sustainable Development Goals (SDGs) juga merupakan suatu program yang disusun untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Eva Indrilestari selaku Pendamping Desa tingkat Kecamatan bidang Teknik Infrastruktur di Kecamatan Gondang, beliau menyampaikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai berikut:

SDGs merupakan program dari pemerintah yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Dalam sebuah pembangunan itu tidak bisa instan perlu yang namanya proses dan penelitian dalam kehidupan masyarakat apa yang dibutuhkan di dalam masyarakat.¹⁵⁴

SDGs memenuhi kebutuhan akan detail pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi riil lapangan. Untuk mengimplementasikan pembangunan yang tepat sasaran maka segala sesuatu memiliki tahapan dalam mencapai tujuan yang tepat sasaran tersebut. Tahapan yang paling tepat adalah mengetahui

¹⁵³ Wawancara dengan Perwakilan DPMD Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Muhaimin tanggal 9 Maret 2022 pukul 10.27

¹⁵⁴ Wawancara dengan Perwakilan Kecamatan Gondang bidang Pendamping Desa tingkat Kecamatan Ibu Eva tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.10

kondisi keadaan masyarakat pada tingkat desa. Desa merupakan ruang teritori terkecil di Indonesia yang memiliki kompleksitas persoalan sosial-ekonomi. Bagi desa-desa di Indonesia, pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa benar-benar dibutuhkan. Bahkan SDGs Desa menjadi acuan utama dalam pembangunan jangka menengah desa seluruh Indonesia. SDGs Desa dimaksudkan untuk memobilisasi pembangunan yang mengarah pada kemajuan, untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan, mengurangi kesenjangan dalam sebuah negara serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengambil langkah strategis untuk perubahan.¹⁵⁵ Bapak Muhaimin juga menjelaskan melalui pernyataannya mengenai SDGs Desa sebagai berikut:

SDGs Desa merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Pusat dan perangkat pemerintahan yang terkait seperti Kementerian Desa sebagai upaya terpadu dalam mewujudkan 18 item yang dapat dilihat dari literatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi seperti beberapa contoh desa tanpa kelaparan, infrastruktur yang sesuai kebutuhan, penanggulangan stunting, dan sebagainya. SDGs Desa juga dapat diartikan sebagai program pemerintah yang membantu masyarakat desa dalam meningkatkan pola kehidupan masyarakat yang luas cakupannya. Nantinya SDGs Desa ini berhubungan untuk mewujudkan SDGs secara nasional, karena pembangunan berasal dari bawah data yang diambil juga berdasarkan data mikro yang lebih detail mengenai keadaan individu masyarakat.¹⁵⁶

SDGs Desa merupakan langkah pemerintah dalam rangka mengetahui mengenai keadaan desa melalui sebuah data yang menggambarkan mengenai profil desa serta masyarakat yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu pendataan perlu dilakukan secara tepat dan lengkap, karena melalui data tersebut akan dijadikan sebuah acuan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan atau merumuskan

¹⁵⁵ Adis Imam Munandar, et. all., *Pembangunan Berkelanjutan...*, hal 21

¹⁵⁶ Wawancara dengan Perwakilan DPMD Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Muhaimin tanggal 9 Maret 2022 pukul 10.30

pembangunan yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan tentunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Eva dalam sebuah pernyataan sebagai berikut:

Dalam perumusan suatu kebijakan pembangunan yang tepat sasaran harus benar-benar mendapatkan data yang secara lengkap, sebenarnya sudah ada data misal dari kementerian sosial itu juga ada data, namun dari kemendesa sendiri juga ada SDGs Desa tentunya juga perlu untuk melakukan pendataan yang secara mikro dan lebih mendalam lagi.¹⁵⁷

Bapak Muhaimin menyatakan mengenai peraturan yang memuat mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Desa sebagai berikut:

SDGs Desa itu juga merupakan pendataan dan dari 18 item itu diperuntukkan untuk desa dan memiliki *output* setiap warga desa berhak terbebas dari kemiskinan, berhak dibiayai negara, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hingga berhak hidup dalam perdamaian. SDGs Desa ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan untuk pelaksanaan mengenai pendataan untuk mencapai tujuan dari SDGs Desa ini diatur dalam Permendesa PDPTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.¹⁵⁸

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Muhaimin tersebut bahwa untuk mencapai tujuan SDGs Desa, atau merealisasikan program SDGs Desa dengan tepat guna (sasaran), tentunya tahapan awal yaitu melakukan program pendataan desa. Pendataan desa sendiri juga terdapat tahapan-tahapan dalam proses penggalan data hingga pemutakhiran data. Dari data tersebut akan dijadikan sebuah landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam

¹⁵⁷ Wawancara dengan Perwakilan Kecamatan Gondang bidang Pendamping Desa tingkat Kecamatan Ibu Eva tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.10

¹⁵⁸ Wawancara dengan Perwakilan DPMD Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Muhaimin tanggal 9 Maret 2022 pukul 10.35

SDGs Desa, nantinya yang akan melaksanakan programnya adalah dari berbagai lembaga atau instansi. Dari sebuah data yang diperoleh nantinya akan dijadikan acuan yang mana akan diterbitkan suatu kebijakan. Suatu misal ada anak usia sekolah namun tidak dapat bersekolah, maka dinas terkait yang akan memberikan saran terhadap permasalahan seperti itu. Oleh sebab itu pendataan desa sangat penting karena merupakan sumber utama, adapun pengertian pendataan desa dan skema serta isi dari pendataan desa secara garis besar menurut Bapak Muhaimin adalah sebagai berikut:

Pendataan SDGs Desa merupakan pendataan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan di desa setempat serta kehidupan masyarakat di dalamnya. Terdapat beberapa indikator pertanyaan yang sudah tertera dalam pendataan SDGs Desa tersebut, seperti pendataan mengenai lingkungan, mengenai keadaan rumah, pekerjaan seseorang, gaji, pengeluaran, kesehatan, dan lain sebagainya. Langkah dari pendataan tersebut, yaitu sosialisasi dulu, kemudian dilakukan adanya rekrutmen pendataan, setelah itu penyampaian program SDGs kepada relawan pendataan. Dan pendataan yang dilakukan relawan itu nanti bersifat langsung *home by home*. Hal ini tentunya wajib dilaksanakan setiap desa di Kabupaten Tulungagung sesuai program yang telah ditetapkan. Tujuan utama SDGs tidak dalam memberikan data saja tetapi nanti juga ada tujuan tertentu yang memberikan *feedback* ke masyarakat. Namun data ini sepenuhnya masih diolah jadi untuk penerapan mencapai tujuan 18 item yang dipaparkan membutuhkan proses dalam mewujudkannya.¹⁵⁹

Ibu Eva juga memberikan pernyataannya mengenai pendataan SDGs Desa sebagai berikut:

Pendataan SDGs sendiri sudah diatur dalam SOP Pemutakhiran Data SDGs Desa dan mengacu dari Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sistem pendataan tersebut juga dilakukan secara *home by home* dan *by name by address* sampai detail dari usia baru lahir dimasukkan.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Perwakilan DPMD Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Muhaimin tanggal 9 Maret 2022 pukul 10.54

Inilah kelebihan dari data SDGs yang mana dari unsur terbawah dan mendalam.¹⁶⁰

Di dalam pendataan tentunya terdapat tahapan-tahapan yang diatur dalam Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dituangkan dalam *Standar Operating Procedure* (SOP) dalam melaksanakan pendataan. Di tingkat Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pendataan desa berperan selaku koordinator pendataan, namun hasil pendataan ini nantinya diberikan kepada Bappeda yang bersifat rahasia. Tentunya partisipasi masyarakat dalam pendataan desa sangat dibutuhkan untuk memberikan kelancaran dalam proses pemungutan data. Elektabilitas masyarakat dalam berargumen sangat menentukan hasil dari kevalidan data yang diperoleh. Bapak Muhaimin berpendapat sebagai berikut:

Data ini nantinya penting untuk dijadikan data dasar dalam menentukan sebuah kebijakan. Ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat secara mikro, kepedulian bukan sekedar mendapat data, nantinya ini dapat dijadikan pedoman untuk memperoleh hak dari desa untuk kategori desa maju, berkembang, atau mandiri. Dari sini peran masyarakat sangatlah dibutuhkan untuk terciptanya sebuah keadilan secara merata.¹⁶¹

Pendataan desa guna sebagai tahapan program SDGs Desa wajib dilakukan oleh seluruh desa di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Gondang adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah bagian barat Kabupaten Tulungagung. Luas wilayah Kecamatan Gondang adalah 37,65 km², dengan

¹⁶⁰ Wawancara dengan Perwakilan Kecamatan Gondang bidang Pendamping Desa tingkat Kecamatan Ibu Eva tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.20

¹⁶¹ Wawancara dengan Perwakilan DPMD Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Muhaimin tanggal 9 Maret 2022 pukul 11.45

batas yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Kauman, sebelah timur adalah Kecamatan Tulungagung, sebelah selatan adalah Kecamatan Pakel dan sebelah barat adalah Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Di Kecamatan Gondang terdiri dari 20 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 59.650 jiwa yang terbagi menjadi laki-laki sebanyak 29.546 jiwa dan perempuan 30.104 jiwa, dan dari 20 desa tersebut seluruh desa telah melakukan pendataan desa. Tentunya dalam proses pendataan, partisipasi masyarakat sangat amat diperlukan untuk mempermudah jalannya pendataan desa, selain itu kesadaran mengenai pentingnya SDGs Desa harus ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat supaya masyarakat lebih berkompeten untuk memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga mempermudah pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan.

Dalam melangsungkan pendataan desa tentunya terdapat beberapa tahapan hal yang dilakukan, adapun tahap yang dimaksud menurut Ibu Eva adalah sebagai berikut:

Tahapan yang dilakukan dari pihak kabupaten memberikan sosialisasi ke tingkat kecamatan, untuk selanjutnya disosialisasikan ke tingkat desa. Setelah itu membentuk tim pendataan di desa, salah satunya tim tersebut terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina, Sekretaris Desa sebagai ketua, dan Kasi Pemerintahan sebagai sekretaris, dengan anggota perangkat desa, karang taruna, dan aspek-aspek di dalam masyarakat desa harus ada. Untuk jumlah anggota dalam pendataan nanti tergantung desa, jadi tidak ada jumlah yang ditentukan, Kepala Desa berhak menentukan berapa jumlah pendata yang diperlukan sesuai masyarakat yang ada pada desa tersebut, yang jelas aspek dalam masyarakat harus dilibatkan.¹⁶²

¹⁶² Wawancara dengan Perwakilan Kecamatan Gondang bidang Pendamping Desa tingkat Kecamatan Ibu Eva tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.34

Proses dari pendataan desa awalnya yaitu dengan menyusun tim pendataan atau dapat disebut Kelompok Kerja Relawan (Pokja Relawan), dengan pembentukan tersebut selanjutnya berkewenangan untuk memutakhirkan data pada level desa, pada level Rukun Tetangga (RT), pada level keluarga, dan pada level individu yang nantinya akan dianalisis bersama guna memperoleh data untuk rekomendasi pembangunan berkelanjutan desa. Dalam pendataannya juga telah disediakan *form* pertanyaan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta telah disediakan aplikasi SDGs Desa, nantinya tim pendataan (relawan) bertugas untuk mengisi aplikasi tersebut dan bertanggung jawab atas data yang dimasukkan. Secara garis besar yang dimuat dalam pendataan ini yaitu yang berkaitan dengan pilar sosial, pilar ekonomi, dan pilar lingkungan. Sesuai pernyataan Ibu Eva sebagai berikut:

Di Kecamatan Gondang sudah menuntaskan program pendataan ini meski ada beberapa kendala terkait aplikasi maupun partisipasi masyarakat. Karena pendataan ini memiliki target, jadi pihak desa dituntut untuk memenuhi target pendataan tersebut. Materi yang terkandung dalam pendataan sangat lengkap dan terperinci, beberapa pertanyaan di dalam pendataan tersebut seperti luas dan ukuran tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, gaji, serta *e-mail* dari warga juga dipertanyakan di dalam pendataan tersebut. Selain itu pendataan-pendataan mengenai bangunan yang ada desa serta jarak dari desa ke tempat-tempat seperti rumah sakit, sekolah, dan beberapa tempat juga dihitung jaraknya. Hal ini juga sangat berpengaruh sebagai status desa untuk nantinya ditentukan sebagai desa maju, desa berkembang, ataupun desa mandiri, berkaitan dengan IDM (Indeks Desa Membangun).¹⁶³

Setiap Pokja Relawan memiliki kewenangan masing-masing dalam menjalankan program pendataan desa tersebut. Pemerintah desa memiliki

¹⁶³ Wawancara dengan Perwakilan Kecamatan Gondang bidang Pendamping Desa tingkat Kecamatan Ibu Eva tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.45

peranan penting terhadap proses pendataan desa sebagai koordinator di tingkat desa dan yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa, adapun peranan pemerintah desa menurut SOP Pemutakhiran Data SDGs Desa dengan merujuk pada Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020 adalah sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Peran Kepala Desa

Pemimpin yang disegani serta memiliki wewenang besar di desa adalah kepala desa. Kepala desa juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan desa, untuk membawa desanya lebih maju. Pembangunan diarahkan untuk mendayagunakan potensi desa, atau mengatasi masalah desa. Untuk itulah dibutuhkan data yang valid, lengkap, dan berkelanjutan. Pada titik inilah kepala desa berperan penting dalam memimpin proses pemutakhiran data SDGs Desa. Tugas kepala desa dalam hal ini adalah:

- a. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa.
- b. Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa.
- c. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa
- d. Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, *Prosedur Operasional Standard Data SDGs Desa*, (t.tp ; tp ; t.th), hal. 7

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 8

2. Peran Sekretaris Desa

- a. Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa.
- b. Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa.
- c. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (*by name by address* atau BNBA), mencakup data:
 - 1) Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, *stunting* pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat.
 - 2) Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat.
 - 3) Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja.
 - 4) Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Bersama-sama pendata mengisikan data BNBA tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah ada di lembaga yang bersangkutan.

- e. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan.
- f. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa.
- g. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan.
- h. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata.
- i. Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah.
- j. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner SDGs Desa.
- k. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mengecek akhir hasil data SDGs Desa.¹⁶⁶

3. Peran Pendata atau Relawan Pemutakhiran Data

- a. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
- b. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 9

- 1) Pendata pengisi kuesioner desa adalah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa.
 - 2) Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga adalah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga.
 - 3) Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga adalah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
- c. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
 - d. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya.
 - e. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pendata:

- a. Mendownload aplikasi pendataan SDGs Desa baik untuk komputer maupun untuk telepon pintar (*smartphone*).
- b. Menjaga telepon pintar dan komputer:
 - 1) Tidak boleh merusak telepon pintar dan komputer.
 - 2) Tidak boleh meletakkan barang-barang yang dapat merusak telepon pintar dan komputer.
 - 3) Menjaga kerahasiaan data dalam telepon pintar dan komputer.

- c. Pemutakhiran data SDGs Desa dilakukan untuk seluruh kuesioner:
- 1) Tidak melewatkan kuesioner desa.
 - 2) Tidak melewatkan kuesioner Rukun Tetangga.
 - 3) Tidak boleh melewatkan satu pun keluarga di desa yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner *enumerator*.
 - 4) Tidak boleh melewatkan satu pun wawancara dengan warga desa yang menjadi tanggung jawab pengisian kuesioner *enumerator*.
- d. Dalam wawancara dengan keluarga dan warga:
- 1) Perhatikan definisi operasional berikut:
 - a) Keluarga: masuk dalam Kartu Keluarga; ini yang digunakan dalam aplikasi kuesioner keluarga.
 - b) Rumah tangga: makan dari satu dapur; contohnya, jika ada anak kuliah yang kos maka keluarganya sesuai KK, sedangkan rumah tangganya adalah menurut sumber makan pagi, siang, dan malam di rumah manakah.
 - 2) Tidak boleh hanya sekali mengunjungi keluarga atau warga yang wawancaranya belum lengkap dan benar, atau responden sulit ditemui.
 - 3) Tidak boleh memilih waktu sembarangan dan ceroboh untuk kunjungan ulang. Pilih waktu terbaik saat responden dapat ditemui dan diwawancarai.
 - 4) Tidak boleh mengisi sendiri aplikasi pendataan SDGs Desa dengan dugaan, atau perkiraan, atau pengetahuan *enumerator*. Seluruh

pertanyaan pada kuesioner (kecuali ada perintah untuk pengamatan) harus ditanyakan kepada responden.

- 5) Tidak boleh menyebutkan sebagian saja dari kuesioner, karena dapat mengakibatkan jawaban tidak lengkap.¹⁶⁷

Sesuai dengan Permendesa PD TT No. 21 tahun 2020, data SDGs Desa adalah milik desa, sehingga pendataan SDGs Desa dilaksanakan dengan metode sensus partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja Relawan Pendataan Desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa sendiri. Dimensi partisipatoris meningkatkan validitas data SDGs Desa. Adapun dimensi sensus artinya mengambil data seluruh wilayah desa dan RT, serta mengumpulkan data dari seluruh keluarga dan warga desa.¹⁶⁸ Ibu Eva telah menjelaskan secara garis besar tugas wewenang dari relawan tersebut serta kendala yang terjadi saat proses pendataan sebagai berikut:

Tugas dan wewenang dari relawan pendataan yaitu prosesnya mendata dari rumah ke rumah, untuk menemui individunya, dan diwawancarai. Peran masyarakat secara langsung masih terdapat masyarakat yang antusias dan kurang antusias. Mengenai keantusiasan dari masyarakat memang beragam, mungkin yang paling berpengaruh mengenai pemahaman maupun arti dan tujuan dari pendataan tersebut. Sebenarnya dari pihak pendata sudah memberikan edukasi namun untuk lebih dalamnya masyarakat masih belum terlalu memahami, oleh sebab itu ini adalah salah satu kendala yang terjadi. Di dalam pendataan juga terdapat pertanyaan yang terlalu *private* terhadap masyarakat, jadi pihak pendata juga merasa kesulitan untuk memperoleh data yang akurat untuk pertanyaan yang *private* tersebut, terkait hal internal tersebut misal gaji, terkadang ada masyarakat yang malu untuk mengatakannya, terkadang juga ada yang ikut-ikutan dengan tetangganya untuk memberikan jawaban, selain itu di dalam pertanyaan

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 9

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal. 13

juga terdapat kolom *e-mail*, namun masyarakat juga enggan untuk memberikan jawaban mengenai hal tersebut. Kadang ada fenomena juga di lapangan bahwa masih ada masyarakat yang sulit untuk didata karena tidak berada di desa atau sedang berdomisili di tempat lain tentunya ini juga menghambat proses pendataan SDGs Desa berlangsung. Pendata memang mendata sesuai KK sesuai aturan yang berlaku.¹⁶⁹

Di dalam pendataan desa tentunya memiliki faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Kelemahan terletak pada masyarakat yang belum memahami mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs), jika dilakukan pendataan hanya sekedar menjawab, bahkan tidak tau tujuannya secara jelas. Sebagian besar *mindset* masyarakat jika ada pendataan pasti mendapatkan sebuah bantuan. Oleh sebab itu dalam pendataan desa ini masih terdapat masyarakat yang enggan menjawab mengenai perolehan gaji karena dianggap sensitif, di dalam masyarakat dalam pendataan desa ini juga ditemui masyarakat menutupi mengenai kesehatan, mengenai tingkat akhir pendidikan, terdapat masyarakat yang memiliki lahan namun tidak disampaikan saat dilaksanakan proses pendataan, selain itu masih banyak masyarakat yang sulit untuk ditemui karena tidak berada di tempat. Hal tersebut menjadi suatu kendala untuk menggali sebuah data. Di sini diperlukan edukasi yang mendalam bagi masyarakat karena tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) itu beragam. Bapak Muhaimin dalam pernyataannya memberikan pemahaman sebagai berikut:

Tentunya data tersebut ditulis sesuai keadaan yang ada, namun pihak pusat tidak serta merta menelan data itu, tentunya pasti diolah kembali dengan kelogisan yang terjadi di masyarakat. Namun tugas dari relawan

¹⁶⁹ Wawancara dengan Perwakilan Kecamatan Gondang bidang Pendamping Desa tingkat Kecamatan Ibu Eva tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.55

hanya mendata, tanpa ada unsur paksaan dan sebagainya, serta menganalisis keadaan saat pendataan untuk nantinya dilaporkan dan dibahas kendala yang terjadi. Misal ada warga yang didata tidak berada di tempat, maka bisa untuk meminta data ke sumber yang terpercaya. Meski dalam peraturan melibatkan seluruh warga desa dan partisipatoris, dan dilakukan secara inklusif, yang berarti pandangan setiap individu diperlukan. Namun jika ada permasalahan dan kesulitan maka seperti itu solusinya. Selain itu edukasi yang kurang akan mempersulit dalam memberikan data, maka dari itu tidak hanya mendata saja dari pihak relawan tapi menjelaskan maksud supaya masyarakat mampu untuk menelan arti dari pendataan itu. Namun memang terkadang masih ada ketidaksesuaian yang terjadi, masih ada masyarakat yang kurang akurat dan benar dalam memberikan data sesuai amanat peraturan. Namun tetap etika tidak boleh memaksa dalam mencari data. Memang kesadaran dalam masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pendataan ini.¹⁷⁰

Dari penjabaran beberapa narasumber dari Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung serta pihak Pendamping Desa tingkat Kecamatan di Kecamatan Gondang, peneliti menggali informasi lebih mendetail untuk menyimpulkan penulisan penelitian ini melalui narasumber dari pihak pemerintah desa, peneliti memiliki target untuk menggali informasi di 11 desa di Kecamatan Gondang, hal tersebut dianggap peneliti sudah lebih dari 50% jumlah desa yang berada di Kecamatan Gondang untuk dapat disimpulkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pendataan desa sebagai tahapan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kecamatan Gondang serta diperkuat oleh Pendamping Desa tingkat Kecamatan selaku koordinator pelaksana dan penanggung jawab pendataan seluruh desa di Kecamatan Gondang. Adapun 11 desa yang dimaksud adalah Desa Kiping, Desa Tiudan, Desa Gondang, Desa Mojoarum, Desa Wonokromo, Desa Kendal, Desa

¹⁷⁰ Wawancara dengan Perwakilan DPMD Bidang Perencanaan dan Pembangunan Desa Bapak Muhaimin tanggal 9 Maret 2022 pukul 11.20

Dukuh, Desa Macanbang, Desa Bendo, Desa Ngrendeng, dan Desa Sepatan. Adapun hasil yang diperoleh dari penggalian data oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Desa Kiping

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Bapak Suparwanto selaku Sekretaris Desa. Beliau menyatakan beberapa fenomena yang terjadi dalam pendataan desa sebagai berikut:

Pendataan ini menurut SOP yang telah diterangkan waktu bimtek mewawancarainya harus ke pihak yang bersangkutan, namun memang terkadang masih ada masyarakat yang sulit untuk ditemui, untuk melancarkan proses pendataan maka sumber yang terpercaya yaitu adalah keluarganya, meski terkadang untuk keakuratan data masih kurang. Karena ada beberapa pertanyaan juga mengenai gaji, serta kesehatan, dan pengeluaran. Ada juga beberapa masyarakat yang tidak terbuka untuk menjawab, seperti halnya ada beberapa masyarakat yang berdagang namun bingung untuk mengatakan hasilnya, dan pada akhirnya untuk rata-rata per bulan diambil yang terendah. Rata-rata kalau di Desa Kiping relawan sulit untuk mengisi mengenai gaji dari masyarakat karena yang memang kurang terbuka dan kadang ada yang memberikan jawaban yang tidak logis serta melimpahkan jawaban kepada relawannya.¹⁷¹

Di Desa Kiping terdapat partisipasi masyarakat yang telah dijelaskan oleh Bapak Suparwanto bahwa tidak dapat menjawab atau minim respon dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang hal sensitif, waktu pendataan desa berlangsung ketika terjadi pandemi *covid-19*, banyak pemikiran warganya jika diadakan pendataan pasti mendapatkan sebuah

¹⁷¹ Wawancara dengan Perwakilan Desa Kiping Bapak Suparwanto selaku Sekretaris Desa tanggal 15 Maret 2022 pukul 08.27

bantuan. Padahal fungsi dari pendataan ini adalah mengetahui keadaan riil di dalam suatu desa.

SDGs Desa secara gambaran umum adalah langkah untuk membantu pemerintah dalam mengetahui profil desa, penduduk dari usia dini, mengenai pendidikan warga, dan pekerjaan serta penghasilan. Pemahaman masyarakat sangat dibutuhkan, kejujuran juga diperlukan untuk memperlancar program. Tujuan dari SDGs ini pada prinsipnya bagus untuk keadilan dan pemerataan, jika pemerintah desa dan masyarakat desa bekerja sama dengan baik, hasil dari pendataan desa ini adalah untuk mengklasifikasikan mengenai status desa sebagai desa berkembang, maju, atau mandiri. Jika dilihat dari pertanyaan yang diajukan sangat mendetail mulai dari keadaan rumah tangga, kondisi rumah, dan lain sebagainya ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa, dan sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dengan baik untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang tepat sasaran. Adapun Bapak Suparwanto memberikan pernyataan mengenai hasil pendataan yang dilaksanakan di Desa Kiping sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat cukup baik, namun ada beberapa kejujuran dari masyarakat yang kurang dalam memberikan data yang valid. Nanti berharap ada seperti pendataan yang serupa yang gunanya agar lebih bisa terupdate dari data yang ada di masyarakat dan masyarakat dengan seiring berjalannya waktu tahu mengenai apa itu SDGs dan tujuannya. Harapan pribadi lebih supaya agar nanti bisa memperoleh keakuratan data.¹⁷²

¹⁷² Wawancara dengan Perwakilan Desa Kiping Bapak Suparwanto selaku Sekretaris Desa tanggal 15 Maret 2022 pukul 08.35

2. Desa Tiudan

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Saudara Fatkhur Rohman selaku Operator Desa dan didampingi oleh Bapak Yuni Santoso selaku Sekretaris Desa. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Masyarakat pada umumnya kurang memahami mengenai tujuan dari pendataan ini secara garis besar untuk apa, karena memang pemahaman jika ada sensus hanyalah dapat bantuan.¹⁷³ Ada juga yang memberikan informasi kurang logis dari masyarakat mungkin mengenai pertanyaan yang sensitif, namun itu tidak dapat disalahkan juga karena memang masyarakat memiliki hak, namun jika berkaca dengan peraturan atau instruksi bahwa memberikan data yang benar tentu ini menyimpang. Bisa dikatakan ada beberapa masyarakat yang kurang jujur, dalam arti seperti penghasilan maupun pendapatan, itu seperti mencari tahu rata-rata masyarakat yang telah didata, untuk mencari rata-rata terendah. Hal semacam ini masih ada dalam lingkup masyarakat.¹⁷⁴ Relawan pendataan sendiri juga harus tahu misal A adalah orang yang memiliki banyak usaha dan dalam penyampaian pendapatan masih kurang logis, tentunya relawan juga dapat menandai untuk nantinya dibahas kembali. Karena jika melihat hasil memang masih menjumpai data yang memang tidak akurat.¹⁷⁵ Terkadang masih banyak juga masyarakat yang tidak dapat ditemui tentunya ini juga menghambat dalam penggalan data.¹⁷⁶

Pendataan desa dalam SDGs Desa merupakan tujuan yang nantinya hasil dari pendataan tersebut akan dijadikan landasan utama untuk menentukan arah pembangunan yang dimulai dari desa. Partisipasi

¹⁷³ Wawancara dengan Perwakilan Desa Tiudan Saudara Fatkhur Rohman selaku Operator Desa tanggal 15 Maret 2022 pukul 09.20

¹⁷⁴ Wawancara dengan Perwakilan Desa Tiudan Bapak Yuni Santoso selaku Sekretaris Desa tanggal 15 Maret 2022 pukul 09.25

¹⁷⁵ Wawancara dengan Perwakilan Desa Tiudan Bapak Yuni Santoso selaku Sekretaris Desa tanggal 15 Maret 2022 pukul 09.28

¹⁷⁶ Wawancara dengan Perwakilan Desa Tiudan Saudara Fatkhur Rohman selaku Operator Desa tanggal 15 Maret 2022 pukul 09.30

masyarakat sangat menentukan hasil dari kebenaran data, di Desa Tiudan masih terdapat masyarakat yang sulit untuk ditemui, tentunya untuk mendapatkan data yang valid tidak mudah, pada akhirnya sumber utama untuk mencari data adalah melalui sumber terdekat yaitu keluarga atau yang bertempat tinggal sesuai KK tersebut, meski nantinya untuk memperoleh keakuratan data bisa dikatakan kurang, namun dikarenakan pendataan ini memiliki target waktu dan merupakan sebuah program, tentunya dalam menjalankan prosedur jika terkendala oleh beberapa faktor akhirnya harus memunculkan sebuah opsi untuk menyelesaikannya. Fenomena lain adalah ketika masyarakat yang melimpahkan jawaban ke relawan pendataan, terkesan acuh untuk pengisian data tersebut, hal ini jelas tidak dibenarkan. Dari keseluruhan tahapan pendataan di Desa Tiudan, dapat disimpulkan melalui pernyataan sebagai berikut:

Jika dapat disimpulkan di Desa Tiudan telah melaksanakan pendataan, namun masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk dimintai data sehingga untuk kebenaran dan keakuratannya belum mencapai 100%, mungkin hal ini dikarenakan pemahaman dari masyarakat yang belum cukup tahu mengenai tujuan dari SDGs, karena bahasa SDGs sendiri yang masih awam dikalangan masyarakat, padahal ini lebih menunjukkan potensi yang ada di desa, agar pemerintah pusat tahu mengenai keadaan terbawah dalam masyarakat desa seperti apa, sehingga jika ada program ke depan dapat lebih tepat sasaran.¹⁷⁷

3. Desa Gondang

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs)

¹⁷⁷ Wawancara dengan Perwakilan Desa Tiudan Bapak Yuni Santoso selaku Sekretaris Desa tanggal 15 Maret 2022 pukul 09.40

Desa dengan Ibu Hani Nasida selaku Operator Desa dan didampingi oleh Ibu Lila selaku Sekretaris Desa. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Di Desa Gondang telah diberitahukan ke masyarakat bahwa ada pendataan SDGs Desa dan sudah diberitahukan kepada masyarakat untuk memberikan data yang dibutuhkan yang sesuai kenyataan. Namun masih ada beberapa masyarakat yang pemikirannya bahwa pendataan pasti mendapatkan bantuan. Padahal yang memiliki pemikiran seperti tersebut terlihat bahwa orang tersebut adalah orang yang dalam kategori mampu. Akhirnya ada juga relawan yang sampai bingung menghadapi masyarakat yang seperti itu. Ada juga relawan yang sulit untuk memperoleh data karena memang dari masyarakat yang enggan untuk memberikan data seperti memberikan KK, kami juga memberikan opsi kepada relawan untuk tetap berusaha memperoleh data dengan sikap yang baik, namun jika tetap sulit untuk memperolehnya dapat ditinggal, karena pendataan ini memiliki target waktu.¹⁷⁸

SDGs Desa itu merupakan survei data, tujuannya yaitu *cross check* data dari pusat ke desa. Data ini akan dipergunakan untuk suatu kebijakan dari pemerintah semisal mengenai bantuan agar tertuju dan tepat sasaran. Di Desa Gondang bisa dikatakan bahwa pendataan desa ini yang menjadi penghambat adalah dari kesadaran masyarakatnya. Hal ini dapat diketahui seperti masyarakat yang enggan memberikan jawaban mengenai hal-hal tertentu seperti *e-mail*, bahkan status rumah yang ditempati terkesan sinis dalam pemberian jawaban, dan beberapa pertanyaan mengenai pengeluaran dan pendapatan yang seakan memasrahkan jawaban ke relawan pendataan. Selain itu penghambatnya ketika masyarakat susah untuk ditemui, terkadang

¹⁷⁸ Wawancara dengan Perwakilan Desa Gondang Ibu Hani Nasida selaku Operator Desa tanggal 17 Maret 2022 pukul 10.25

kerja di luar kota, hal ini juga sebagai faktor kesulitan mendapatkan data yang akurat dan benar.

Di Desa Gondang dapat disimpulkan bahwa setelah terkumpul semua, keakuratan data masih belum mencapai 100% dikarenakan memang sumber data yang diperoleh, lalu mengenai jawaban yang kurang jujur dari pihak masyarakat, hal ini dapat dilihat dari respon masyarakatnya itu sendiri. Untuk mengenai ketepatan waktu dalam pendataan tetap sesuai jadwal program yang telah ditentukan.

4. Desa Mojoarum

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Bapak Nur Hadi selaku Sekretaris Desa dan didampingi oleh Ibu Hj. Emy selaku Kepala Desa. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Memang pendataan ini sangat rinci dan mikro, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yang dialami relawan pendataan di lapangan. Ada beberapa masyarakat yang masih enggan memberikan data dan acuh dalam merespon pendataan ini, karena belum sepenuhnya paham mengenai tujuan dari SDGs ini padahal dari pihak relawan telah memberikan sosialisasi mengenai SDGs Desa ini.¹⁷⁹ Banyak yang susah ditemui juga dalam proses pendataannya, dikarenakan tidak sedang bertempat tinggal di wilayah desa. Tentunya jika mengacu terhadap peraturan yang ada yang menemui warga secara langsung untuk diwawancarai jelas ini menjadi kendala, namun berhubung ini merupakan program dan ada target penyelesaian ada beberapa opsi yang dilakukan untuk memperoleh data seperti bertanya kepada sumber terpercaya yaitu keluarga, ataupun bisa juga menghubungi via telepon, namun jika opsi itu tidak dapat dilakukan yang jelas data tetap dimasukan karena

¹⁷⁹ Wawancara dengan Perwakilan Desa Mojoarum Bapak Nur Hadi selaku Sekretaris Desa tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.05

yang terpenting ada identitas diri di mana berdomisili di desa, belum pindah tempat tinggal.¹⁸⁰

Menurut peraturan pendataan ini berlangsung secara *home by home*, tujuannya untuk dapat mengetahui keadaan yang ada di desa, dari mulai data pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, kondisi rumah, kesehatan, aktivitas penduduk, dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memperoleh data di tingkat individu, keluarga, RT, maupun di tingkat desa, namun di Desa Mojoarum terdapat partisipasi masyarakat yang kurang untuk menyukseskan program pendataan desa tersebut hal ini terlihat ketika mendata di tingkat RT, ketika dimintai data mengenai jumlah warga yang memiliki jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan tidak bisa memberikan data, yang seharusnya di RT bisa mengetahui tentang kondisi warga RT, namun seperti kurang dapat memberikan informasi, dan ada beberapa aspek lain yang juga tidak dapat memperoleh data di lingkup RT.

Sebenarnya desa sudah ada data namun tetap dilakukan pendataan untuk lebih mendapatkan data yang akurat namun partisipasi masyarakat bisa dikatakan kurang. Selain itu dari masyarakat sendiri juga terkadang dalam dimintai keterangan mendapat respon yang kurang baik, seperti melimpahkan jawaban untuk terserah dijawab oleh relawan pendataan, ada juga yang tidak bisa menjawab mengenai penghasilan dan pengeluaran serta data yang lebih sensitif, padahal ini juga diperlukan karena memang *form* pertanyaan dalam pendataan desa juga ada. Namun kembali lagi masyarakat juga memiliki hak

¹⁸⁰ Wawancara dengan Perwakilan Desa Mojoarum Ibu Hj. Emy selaku Kepala Desa tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.10

untuk menjawab dari segala pertanyaan yang diajukan. Dapat disimpulkan oleh Ibu Hj. Emy pendataan desa di Desa Mojoarum sebagai berikut:

Tentunya harapannya ke depan ini bisa menjadi evaluasi juga, karena memang jika dilihat waktu yang diberikan cukup sedikit sedangkan materi pembahasan dalam pendataan cukup banyak dan sistemnya yang harus menemui warga, sedangkan jika melihat kondisi masyarakat desa itu beragam. Namun untuk selebihnya di Desa Mojoarum ini telah dilakukan pendataan dengan baik dan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.¹⁸¹

5. Desa Wonokromo

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Saudara Falikhul Isbaca selaku Operator Desa dan didampingi oleh Bapak Aghis Faizin selaku Kepala Desa. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Jika mengacu terhadap bimbingan teknis yang dilaksanakan, pendataan dilakukan secara langsung, menemui masyarakat dan dimintai keterangan, serta masyarakat diwajibkan memberikan keterangan yang benar dan akurat sesuai keadaan yang ada. Namun masih terdapat beberapa masyarakat yang sulit dimintai keterangan dikarenakan di luar kota. Ini merupakan kendala yang terjadi, selain itu dari pihak masyarakat kurang bisa berkata jujur jika diberikan pertanyaan yang terkesan sensitif, hal ini dapat diketahui dari kelogisannya secara langsung, padahal ada yang punya lahan pertanian juga, namun tidak dikatakan, sebenarnya desa juga ada datanya, namun ini lebih ke cek secara detail lagi ke masyarakat, namun tanggapannya masih kurang akurat.¹⁸² Ketika tidak menjumpai masyarakat yang dituju untuk didata, maka sumber utama untuk menggali data adalah keluarga terdekat, namun untuk

¹⁸¹ Wawancara dengan Perwakilan Desa Mojoarum Ibu Hj. Emy selaku Kepala Desa tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.20

¹⁸² Wawancara dengan Perwakilan Desa Wonokromo Bapak Aghis Faizin selaku Kepala Desa tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.45

kebenaran dan keakuratan data masih kurang, karena di dalam pendataan ada pertanyaan mengenai hal pribadi.¹⁸³

Pendataan desa sebagai tahapan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan pendataan terkait pembangunan berkelanjutan desa, pembangunan yang dimaksud tidak hanya terfokus dalam hal infrastruktur, melainkan pembangunan dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan juga diperhatikan. Dari pendataan yang dilakukan nantinya akan dijadikan sebuah konsep mendasar atau acuan pemerintah pusat mengenai kebijakan apa yang tepat dengan cara melihat kondisi yang ada di dalam masyarakat melalui data. Hal ini juga merupakan salah satu aspek memajukan pembangunan tingkat nasional yang berawal dari desa.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan, pendataan desa merupakan bagian dari pembangunan tahap awal namun memiliki dampak besar bagi keberlangsungan pembangunan. Terkadang pemahaman masyarakat jika ada pendataan pasti berkaitan dengan mendapat bantuan, sedangkan SDGs merupakan pendataan secara mikro di bawah naungan Kementerian Desa. Pendataan dilakukan oleh relawan pendataan yang dibentuk berdasarkan Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020.

Terlepas dari fenomena partisipasi masyarakat yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku ketika dilaksanakan pendataan untuk memperoleh data yang benar, seperti halnya memberikan keterangan yang tidak benar

¹⁸³ Wawancara dengan Perwakilan Desa Wonokromo Saudara Falikhul Isbaca selaku Operator Desa tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.47

ketika diwawancarai oleh relawan, karena memang relawan sendiri dalam mewawancarai tidak cukup sekali namun lebih dari sekali sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat teguh pendirian dalam menjawab atau tidak, terkadang ketika diberi pertanyaan yang sama menjadi beda dalam memberikan jawaban, hal seperti ini tentunya membuat bingung dalam menentukan bagaimana kebenaran data. Selain itu masih banyak masyarakat yang susah untuk dijumpai, serta masyarakat yang melimpahkan wewenang dalam menjawab ke relawan pendataan, tentunya hal-hal semacam ini merupakan partisipasi yang tidak dibenarkan, namun kembali lagi bahwa masyarakat memiliki hak untuk berargumentasi dalam sebuah pendataan.

Namun pada keseluruhan proses pendataan bahwa di Desa Wonokromo sudah terlaksana dengan tepat waktu, namun untuk hasil data belum 100% akurat berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi.

6. Desa Kendal

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Bapak Sutaji selaku Sekretaris Desa. Beliau menyatakan beberapa fenomena yang terjadi dalam pendataan desa sebagai berikut:

Jika diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan pendapatan masih ada beberapa masyarakat yang bingung untuk menjawab, hal ini disampaikan dari relawan mengenai kendala yang terjadi. Seperti halnya juga status tempat tinggal yang dimiliki, masih seperti enggan. Bahkan terkadang ada yang seperti melimpahkan jawaban ke relawan, seperti halnya mengenai data kesehatan, itu ada seperti pertanyaan-pertanyaan kecil sakit yang dialami selama setahun terakhir, dan pernah ke klinik atau tidak, hal seperti ini seperti tidak mau menjawab padahal pertanyaan-pertanyaan itu juga termuat

dalam aplikasi pendataan yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, selain itu pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan sosial yang dilakukan seperti partisipasi siskamling ataupun partisipasi jika ada kematian di masyarakat desa, dalam pertanyaan tersebut akan dipertanyakan berapa kali sudah dilakukan dalam setahun terakhir, memang hal ini mungkin masyarakat juga tidak mengingat namun pelimpahan jawaban ini yang dirasa kurang tepat. Namun jika berbicara program, otomatis bagaimana mengenai tugas yang diberikan seharusnya dilakukan dengan baik, di desa hal pendataan ini sudah cukup baik namun masih terdapat masyarakat yang kurang bisa dimintai keterangan seperti halnya yang telah disebutkan.¹⁸⁴

Di Desa Kendal untuk mengenai pemahaman secara mendetail masyarakat masih kurang memahami mengenai SDGs Desa ini meski dari pihak relawan dalam melakukan pendataan selalu mengedukasi tujuan dari pendataan tersebut. Namun juga terkadang masih ada beberapa masyarakat yang masih enggan untuk memberikan jawaban, karena memang di dalam *form* pertanyaan pendataan terdapat pertanyaan sensitif. Karena pada saat itu juga bertepatan dengan pendataan bantuan, akhirnya masyarakat juga berpikiran bahwa pendataan ini juga memperoleh bantuan, padahal tujuannya bukan itu melainkan menggali data untuk nantinya bisa diketahui bagaimana profil Desa Kendal dan seisinya, yang nantinya juga akan membantu untuk diklasifikasikan menjadi desa maju, berkembang, ataupun mandiri.

Di Desa Kendal juga terdapat beberapa kendala seperti beberapa masyarakat yang sulit untuk ditemui, selain itu ada juga yang tercatat dalam KK di Desa Kendal, namun tidak bertempat tinggal di desa, untuk memperoleh data maka sumber terdekatlah yang bisa untuk dimintai

¹⁸⁴ Wawancara dengan Perwakilan Desa Kendal Bapak Sutaji selaku Sekretaris Desa tanggal 24 Maret 2022 pukul 09.18

keterangan namun hal ini juga ada dampaknya yaitu mengenai kebenaran data maupun keakuratannya masih diragukan, karena hal tersebut terdapat pertanyaan yang menjurus ke hal pribadi atau sensitif.

Adanya pendataan desa ini tentunya membantu desa untuk mengetahui lagi jumlah KK dan warga yang ada di desa, sebenarnya sudah ada data namun dicocokkan kembali. Pada intinya adanya pendataan desa membantu desa untuk menata data yang lebih baik, bagus, dan tertata. Untuk kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh cukup bagus mendekati sempurna namun masih ada beberapa warga masyarakat desa yang acuh terhadap pemberian data, hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang masyarakat memiliki SDM yang beragam.

7. Desa Dukuh

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Ibu Suci Alfiana Widyaningsih selaku Sekretaris Desa dan didampingi oleh Bapak Cuk Sindu Wiyoso selaku Kepala Desa. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Data ini nantinya kan juga memiliki tujuan mengenai pemetaan, pemetaan mana yang seharusnya dimasukkan ke data terpadu.¹⁸⁵ Kadang ada juga masyarakat yang ber-KTP di Desa Dukuh namun bekerja di luar kota maupun luar negeri, sedangkan ketika bertanya ke keluarga mengenai keadaan masyarakat tersebut juga akses komunikasinya tidak ada, tentunya hal yang semacam ini ditinggal dalam pendataannya karena tidak memungkinkan untuk melacak sampai menemui kontak dari masyarakat tersebut karena program ini juga dibatasi waktu. Namun di desa juga ada data mengenai KK

¹⁸⁵ Wawancara dengan Perwakilan Desa Dukuh Bapak Cuk Sindu Wiyoso selaku Kepala Desa tanggal 24 Maret 2022 pukul 10.00

yang berada di desa, jadi jika ada masyarakat seperti yang disampaikan tentunya untuk data KK dimasukkan namun untuk survei individunya ditinggal.¹⁸⁶

SDGs merupakan tujuan yang mana memprioritaskan beberapa hal seperti desa tanpa kemiskinan, nantinya akan ada tujuan yang dicapai dari pendataan desa tersebut, tujuan akhirnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat desa. Data yang diperoleh nanti juga untuk kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang nantinya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Dalam SDGs Desa pendataan dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu pendataan desa, pendataan RT/RW, pendataan keluarga, dan pendataan individu. Untuk pendataan desa itu yang menjadi informan yaitu perangkat desa, sedangkan pendataan RT/RW, keluarga, dan individu yaitu masyarakat, dan yang diberikan kewenangan adalah relawan pendataan.

Proses pendataan ini sistemnya mendatangi rumah dari masyarakat, lalu menemui masyarakatnya untuk dimintai keterangan. Jika mengacu dari bimbingan yang disosialisasikan memang pendataan ini menemui individu, namun dikarenakan waktu yang terbatas, dan kesulitan untuk menemui masyarakat satu per satu pada akhirnya keluarga dalam satu KK itulah yang sebagai pemberi data.

Di Desa Dukuh dapat dikatakan jika data yang diperoleh tingkat kebenarannya dan keakuratannya masih kurang, hal ini dikarenakan mengenai penyampaian informasi yang diwakilkan itu sendiri, selain itu

¹⁸⁶ Wawancara dengan Perwakilan Desa Dukuh Ibu Suci selaku Sekretaris Desa tanggal 24 Maret 2022 pukul 10.05

kelogisan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu. Selain itu dari pihak relawan sendiri itu juga ada yang rajin dan tidak, hal ini juga terlihat ketika ada masyarakat yang melimpahkan jawaban, relawan pendataan juga menyetujui bisa dikatakan mengisi kuesioner menurut dugaan, oleh sebab itu ini juga akan menjadi evaluasi untuk kedepannya jikalau dilakukan pendataan yang seperti ini lagi untuk mencapai data yang akurat.

8. Desa Macanbang

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Ibu Juwarti selaku Plt Sekretaris Desa. Beliau menyatakan beberapa fenomena yang terjadi dalam pendataan desa sebagai berikut:

Untuk melakukan pendataan dibentuklah relawan yang nantinya terjun untuk mendata masyarakat secara detail dari rumah ke rumah menemui masyarakat secara langsung. Kendala yang terjadi dalam pendataan SDGs Desa terkadang masih ada beberapa warga yang jika dimintai KK, itu yang diberikan KK lama, padahal KK tersebut sudah diperbarui karena ada anggota keluarganya yang sudah pindah, ada juga mengenai kematian, dan ada beberapa warga yang masih enggan untuk memberikan KK yang baru, hal ini merupakan kendala yang terjadi. Selain itu masyarakat juga seperti bingung untuk memberi jawaban mengenai pendapatan, dan pada akhirnya melimpahkan jawaban ke relawan yang mendata, selain itu juga masih terdapat masyarakat yang sulit untuk ditemui. Hal ini tentunya hambatan untuk memperoleh data yang valid dan benar.¹⁸⁷

Pendataan desa merupakan pendataan yang mencakup data pekerjaan, ekonomi, kondisi rumah, kemudian mengenai kesehatan, terus sosial media, nomor hp, kependudukan, dan lain sebagainya. Di dalam

¹⁸⁷ Wawancara dengan Perwakilan Desa Macanbang Ibu Juwarti selaku Plt Sekretaris Desa tanggal 24 Maret 2022 pukul 10.40

pendataan desa tersebut sangat lengkap dan melingkup seluruh data yang ada di masyarakat desa. Tujuan dari pendataan desa ini nantinya untuk mengklasifikasikan desa dan anggaran dana desa yang akan diperoleh nantinya. Tentunya dari data ini akan diolah dan dapat diberikan kebijakan untuk menyelenggarakan pembangunan yang tepat sasaran di desa, nantinya jika desa sudah tertata dengan baik maka ini akan menunjang terciptanya pembangunan secara nasional, diperbaikinya dari unsur paling mikro yaitu desa.

Terlepas dari beberapa masyarakat di Desa Macanbang yang enggan memberikan jawaban, adanya pendataan desa ini memberikan keuntungan bagi desa untuk melihat perkembangan di dalam masyarakat, sehingga nantinya untuk lebih merapikan data di desa, karena dari data tersebut akan mengetahui mengenai keadaan-keadaan mendetail di desa.

9. Desa Bendo

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Saudari Nina selaku Operator Desa dan didampingi oleh Bapak Maryadi selaku Kepala Desa. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Kadang itu mengenai pertanyaan sensitif seperti pendapatan, masyarakat masih terdapat yang merekayasa.¹⁸⁸ Ada juga dari masyarakat yang masih muda juga ada yang memiliki *e-mail*, facebook, nomor hp juga enggan untuk diberikan, padahal setiap hari juga terlihat memegang *smartphone*. Pertanyaan ini memang

¹⁸⁸ Wawancara dengan Perwakilan Desa Bendo Bapak Maryadi selaku Kepala Desa tanggal 28 Maret 2022 pukul 09.17

tersedia dan seharusnya masyarakat mampu berpartisipasi dengan baik dalam memberikan informasi karena nantinya semua untuk perbaikan dari segala aspek yang berada di masyarakat.¹⁸⁹ Ada juga masyarakat yang tidak berada di Desa Bendo namun berdomisili di tempat lain, ini juga suatu hambatan, dan pada akhirnya untuk pendataan ditinggal.¹⁹⁰

Dari pendataan desa ini, nantinya akan mengetahui kondisi desa seperti apa, apakah masuk kategori desa tertinggal atau berkembang, hal ini juga nantinya akan memberikan dampak positif juga untuk pembangunan secara nasional, data ini juga diperolehnya secara mikro dari unsur terbawah yaitu individu setiap masyarakatnya.

Waktu dalam pendataan yang sangat singkat, serta terkendala sistem merupakan kendala yang dialami. Dalam proses pendataan desa membentuk relawan kelompok kerja dari unsur-unsur yang ada di desa, kemudian memberikan sosialisasi tata cara pendataan dan mengunggah data dalam aplikasi. Tata cara pelaksanaan relawan mendatangi masyarakat secara langsung untuk menggali informasi. Stigma masyarakat menganggap bahwa setiap ada pendataan pasti ada bantuan, ada juga yang sensi untuk memberikan KK juga dari pihak masyarakat. Selain itu dari relawan sendiri juga masih belum sepenuhnya paham untuk pendataan ini sebenarnya untuk apa dan pada akhirnya mengisi kuesioner pertanyaan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat dengan cara dugaan, namun bagaimanapun yang namanya program harus dilaksanakan.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Perwakilan Desa Bendo Saudari Ninda selaku Operator Desa tanggal 28 Maret 2022 pukul 09.20

¹⁹⁰ Wawancara dengan Perwakilan Desa Bendo Bapak Maryadi selaku Kepala Desa tanggal 28 Maret 2022 pukul 09.25

10. Desa Ngrendeng

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Saudara Dwi Bagas Wicaksono selaku Operator Desa. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Untuk masyarakat sendiri masih ada yang sulit untuk dimintai keterangan karena ada yang bekerja di luar dari kota bahkan luar negeri, untuk menggali data yang akurat maka juga tidak bisa karena sumber data utama adalah dari keluarganya. Sebenarnya bisa *by phone* juga, namun terkadang juga tidak selalu bisa komunikasi dengan enak, karena memang pertanyaan yang diberikan banyak serta membutuhkan waktu untuk menggalinya. Kalau berpedoman dengan SOP memang harus menemui warga karena juga terdapat pertanyaan yang bersifat pribadi, namun tentunya hal ini bisa dikatakan menyimpang karena memang sulit jika harus menemui seluruh warga secara langsung, apalagi juga pendataan ini ada target waktu.¹⁹¹

Di Desa Ngrendeng terdapat kendala seperti masyarakat yang enggan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh relawan pendataan, untuk data pendapatan juga masih ada masyarakat yang merekayasa, juga mengenai data pengeluaran masyarakat juga melimpahkan jawaban ke relawan sehingga relawan juga merasa bingung. Terkadang untuk mengenai pendapatan, masyarakat melihat data masyarakat lain untuk nantinya melihat rata-rata terendah, hal ini juga salah sebenarnya, karena menurut instruksi yang ada yaitu memberikan data yang sebenarnya. Selain itu, ada pula dari masyarakat yang enggan memberikan nomor hp, *e-mail*, alamat sosial media, padahal hal semacam ini juga dipertanyakan dan

¹⁹¹ Wawancara dengan Perwakilan Desa Ngrendeng Saudara Bagas selaku Operator Desa tanggal 28 Maret 2022 pukul 09.50

pertanyaan-pertanyaan ini memang ada bukan rekayasa sepihak melainkan ini program dari pemerintah.

Beberapa fenomena lain mengenai status kepemilikan rumah ada yang tidak memberikan dengan jelas status kepemilikan rumah, ada juga yang tidak tahu mengenai luas bangunan tempat tinggal serta lantai. Selain itu ada juga yang mendapat beberapa bantuan namun tidak diutarakan. Selain itu terdapat masyarakat yang memiliki aset atau lahan pertanian juga tidak disampaikan. Jadi itu merupakan keluhan di lapangan dari relawan, selain mendata relawan juga memantau tentang masyarakat mengenai kelogisan dalam menjawab. Jadi relawan yang berasal dari RT A itu juga mendata masyarakat dari RT A, dari situ setidaknya relawan paham mengenai keadaan warga-warga sekitar. Ada pula laporan bahwa pihak RT enggan memberikan laporan mengenai data-data di RT. Begitulah kurang lebih kendala yang terjadi di desa. Relawan sendiri juga bermacam-macam karakternya ada yang rajin dan sebaliknya.

Sebenarnya dampak positif yang didapatkan adalah desa menjadi lebih tahu mengenai keadaan masyarakat di dalam desa, bisa untuk bahan evaluasi perbaikan data juga. Namun tetap ada dampak negatifnya, data yang didapatkan belum benar dan akurat karena memang yang namanya masyarakat desa itu beragam, tanggapan serta partisipasinya juga beragam jika ada suatu program. Hal ini juga diharapkan kesadaran yang penuh dari masyarakat untuk ke depan, untuk menciptakan kebijakan yang tepat guna.

11. Desa Sepatan

Peneliti menggali informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pendataan desa terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa dengan Saudara Fery Fatur selaku Operator Desa. Adapun pernyataan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Ada beberapa kendala untuk memperoleh data, yang pertama kesulitan dari relawan kelompok kerja untuk menemui masyarakat yang di data, ada yang tidak berada di tempat tinggal karena bepergian ataupun bekerja, pada akhirnya sumber data yang digali tidak dari sumber utamanya, melainkan dari sumber lain yaitu keluarga, ada juga yang bisa dihubungi via *phone* namun dirasa kurang efektif oleh relawan karena terbatas jika via media, ini merupakan kendala karena untuk memperoleh data yang akurat tidak bisa, karena memang ada beberapa pertanyaan yang menjurus mengenai keadaan kepribadian seseorang yang sudah dianggap dewasa, terkecuali anak-anak yang masih dalam naungan orang tua itu masih bisa diwakilkan oleh orang tuanya, atau orang yang dirasa belum dan atau tidak cakap dalam memberikan jawaban, seperti halnya orang disabilitas serta anak-anak itu sendiri.¹⁹²

Di Desa Sepatan terdapat masyarakat yang enggan untuk jujur mengenai pertanyaan tertentu, katakanlah pendapatan, masih banyak sekali untuk masyarakat yang terkesan bingung dalam menjawab, ataupun bingung dalam menghitung perkiraan hasil apalagi yang memiliki sumber penghasilan dari usaha, hal ini tidak dapat dipungkiri karena pemikiran dari masyarakat jika ada pendataan pasti mendapatkan bantuan, padahal data SDGs ini tujuan utamanya bukan mengenai hal itu melainkan lebih ke mengetahui dulu keadaan masyarakat seperti apa kemudian bisa ditentukan kebijakan yang tepat itu seperti apa sesuai kegunaannya.

¹⁹² Wawancara dengan Perwakilan Desa Sepatan Saudara Fery tanggal 2 April 2022 pukul 10.16

Relawan juga diharuskan pintar dalam menganalisis data secara langsung, ada juga masyarakat yang memiliki pekerjaan dan sejumlah lahan namun untuk pendapatan terkesan diminimumkan, selain itu ada yang mendapat bantuan namun tidak diutarakan, padahal ada kolom pendataan perolehan bantuan. Selain itu masih terdapat masyarakat yang melimpahkan jawaban pendataan ke relawan karena bingung untuk menjawab, seperti halnya aktivitas siskamling dalam setahun terakhir berapa kali, lalu pernah sakit apa saja, pernah ke apotik berapa kali, hal semacam ini juga dipertanyakan, namun masyarakat seperti bingung akhirnya melimpahkan ke relawan, seharusnya sumber utama yaitu jawaban dari masyarakat tersebut namun masih ada yang bersikap seperti itu.

Sebenarnya cukup baik dalam materi yang terkandung dalam SDGs Desa ini karena jadi bahan evaluasi juga buat pihak pemerintah desa untuk mengetahui warganya serta perbaikan data.

SDGs Desa merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat 18 indikator di dalam SDGs Desa salah satunya yaitu desa tanpa kelaparan, desa tanpa kemiskinan, dan lain sebagainya yang telah disebutkan di dalam peraturan. Pendataan SDGs Desa merupakan penggalian informasi mengenai segala yang ada di dalam desa, pendataannya meliputi pendataan desa, pendataan rumah tangga, lalu ada pendataan KK, serta pendataan secara individu. Di dalam pendataan tersebut dibekali beberapa pertanyaan yang sangat mendetail, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam memberikan data yang akurat sesuai peraturan yang berlaku.

Proses pendataan yang pertama dilakukan yaitu membentuk relawan pendataan oleh Kepala Desa, nantinya untuk relawan pendataan SDGs ini diketuai oleh Sekretaris Desa, unsur yang diambil yaitu unsur-unsur yang ada di desa seperti kalangan pemuda, unsur perempuan harus ada, dan setiap RT itu pasti ada relawan yang mendata. Pendataan di tingkat desa itu sumber data itu adalah perangkat desa, dan untuk pendataan RT, KK, dan individu dilakukan relawan dan sumber datanya adalah masyarakat. Jadi relawan kelompok kerja ini melakukan *survey* ke setiap rumah di desa, dan menemui masyarakat secara langsung untuk dimintai keterangan.

Dari seluruh proses pendataan yang berlangsung di Kecamatan Gondang, Ibu Eva Indrilestari selaku Pendamping Desa tingkat Kecamatan bidang Teknik Infrastruktur di Kecamatan Gondang memberikan pernyataan bahwa partisipasi sudah cukup baik yang dilakukan di wilayah Kecamatan Gondang dari pihak masyarakat, diluar fenomena-fenomena yang terjadi saat dilakukannya pendataan, namun jika berbicara mengenai keakuratan dan kebenaran data bisa dikatakan *fifty-fifty*, yang artinya 50% benar yaitu data itu pasti dan benar terkait nama, NIK, status itu sudah ada, dan 50% yang kurang akurat tentunya yang berkaitan dengan pertanyaan yang lebih ke arah *private*. Namun data ini nanti juga pasti diolah kembali untuk melihat kelogisannya.

Dengan berpartisipasi dalam sebuah pendataan yang merupakan sebuah program yang diadakan oleh pemerintah maka hal ini merupakan cerminan dari cinta tanah air, dan merupakan sebagian dari iman. Tentunya kita tahu bahwa bentuk cinta tanah air itu bermacam-macam, seperti dalam SDGs Desa ini,

peraturan SDGs Desa disusun untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, maka dari itu sudah sepatutnya jika masyarakat berpartisipasi dengan baik sesuai dengan peraturan, karena dengan kepatuhan tersebut merupakan cerminan dari bentuk cinta terhadap tanah air. Bapak H. Mahfud Pandjaitan selaku tokoh agama yang berada di Kecamatan Gondang memberikan sebuah pernyataan sebagai berikut:

Pendataan masyarakat desa itu merupakan salah satu proses dari sebuah perencanaan dalam sebuah pembangunan, dalam pengkajiannya hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S Al-Hasyr: 18). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, di mana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin) serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.¹⁹³

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan data penelitian yang ada di lapangan mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Pendataan Desa Sebagai Tahapan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Perspektif Permendesa PD TT No. 21 Tahun 2020 dan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)”, peneliti mendapatkan temuan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya SDGs Desa, masih terdapat masyarakat di Kecamatan Gondang yang sulit untuk dimintai data karena

¹⁹³ Wawancara dengan Tokoh Agama di Kecamatan Gondang Bapak H. Mahfud Pandjaitan tanggal 19 April 2022 pukul 09.00

maksud dan tujuan dari data ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat secara penuh meski telah diberikan penjelasan oleh relawan pendataan. Sedangkan SDGs Desa ini dari pendataan yang dilakukan itu untuk mengumpulkan segala informasi tentang masyarakat yang berada di desa sebagai sumber data, nantinya untuk pengembalian kebijakan itu tidak secara langsung melainkan bertahap dan sesuai kepentingan serta apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan informasi, ini merupakan kendala yang terjadi di lapangan khususnya di wilayah Kecamatan Gondang.

2. Sulitnya menemui sumber data utama juga merupakan kendala yang terjadi, pendataan desa ini diberikan arahan untuk mendapatkan data yang benar serta lengkap dan akurat, sedangkan sumber data di lapangan masih terdapat dari masyarakat yang tidak dapat ditemui dikarenakan beberapa hal, pada akhirnya untuk penggalian data terlewat, namun terdapat juga penggalian data diwakilkan dari pihak lain yang berhubungan dengan sumber data utama tersebut, hal ini merupakan kesulitan yang terjadi untuk memperoleh data yang valid dikarenakan tidak mendapatkan sumber dari masyarakat yang berwenang tersebut, hal ini penting karena di dalam pendataan desa memuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke dalam kepribadian dan privasi.
3. Kesadaran masyarakat maupun relawan terhadap pentingnya program SDGs Desa merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan dan bersifat penting karena merupakan program pemerintah, pendataan desa juga merupakan aspek di dalam SDGs Desa tersebut serta merupakan program yang

diwajibkan untuk dijalankan di dalam setiap pemerintahan desa, serta target pelaksanaan yaitu masyarakat secara mikro itu sendiri. Namun di dalam pelaksanaan program ini masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak sesuai konsep pendataan, seperti melimpahkan jawaban terhadap relawan, seperti terlihat acuh terhadap program tersebut, dan selain itu masih terdapat pula dari pihak relawan yang melakukan pengisian secara rekayasa atau dugaan dikarenakan sulitnya memperoleh data secara benar serta lengkap.